



SEMARANG NIGHT FESTIVAL: Ratusan peserta Semarang Night Carnival 2023 berkumpul di Kotta Hotel, Kota Lama, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (19/5/2023) malam. Menurut GM Kotta Hotel Firdha Lail Agusta, pada even yang baru di gelar Pemkot Semarang setelah vakum karena Covid-19 ini terdapat 75 Kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di kota tersebut yang mengikuti Pemilihan Kostum dan Make Up Terbaik.

KR-Chandra AN

UNTUK KELUARGA RISIKO STUNTING

Bantuan Telur-Daging Ayam Capai 69%

JAKARTA (KR) - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan, realisasi bantuan pangan telur dan daging ayam kepada 1,4 juta Keluarga Risiko Stunting (KRS) telah mencapai 69 persen atau 995.000 paket per 18 Mei 2023. "Total ada tujuh provinsi yang menjadi sasaran penyaluran. Kita juga sudah mulai penyaluran di dua provinsi di wilayah Indonesia Timur, yaitu NTT dan Sulawesi Barat," kata Arief Prasetyo Adi di Jakarta, Jumat (19/5).

Menurut Arief, penyaluran tahap pertama bantuan pangan telur dan daging ayam secara rinci telah terdistribusi di enam provinsi yaitu Banten sebanyak 51.000 paket (79 persen), Jawa Barat 338.000 paket (82 persen), Jawa Tengah 308.000 paket (95 persen), Jawa Timur 252.000 paket (67 persen), serta Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Barat, dan Sumatera Utara 46.000 paket (33 persen).

Arief menjelaskan, Pemerintah menggenjot penyaluran bantuan pangan telur dan daging ayam kepada 1,4 juta penerima. Upaya itu selain untuk menurunkan

angka stunting juga dalam rangka pengendalian harga telur dan daging ayam di tingkat konsumen.

"Tujuan utama program ini untuk menurunkan angka stunting, namun dengan melibatkan mitra peternak mandiri kecil sebagai penyuplai produk, maka program yang dijalankan sesuai arahan Presiden ini diakui para peternak turut berkontribusi menjaga stabilitas harga jual telur dan daging ayam di tingkat peternak," ujarnya.

Guna mendorong percepatan penyaluran bantuan, Bapanas juga mendorong Holding BUMN Pangan ID FOOD untuk mempercepat penyaluran bantuan, se-

hingga tahap pertama bisa segera rampung dan bisa segera memasuki tahap kedua dan ketiga.

Untuk langkah percepatan pendistribusian yang akan dilakukan, menurut Arief, di antaranya melalui peningkatan fasilitas distribusi stok telur dan daging ayam dari sentra produksi ke provinsi atau daerah yang terbatas stoknya.

"Selain itu, kita minta ID FOOD menambab dan meningkatkan kerja sama kemitraan dengan peternak mandiri kecil sehingga stok pendistribusian aman dan pendistribusian melalui PT Pos bisa dipercepat," sebutnya.

Direktur Utama ID FOOD Frans Marganda Tambunan mengatakan, mulai pekan ketiga Mei ini dan seterusnya, ID FOOD sudah mulai penyaluran ke Sulbar dan NTT. "Kami akan mengejar realisasi distribusi di tujuh provinsi tersebut sesuai jumlah KRS dan tenggat waktu yang ditetapkan Badan Pangan Nasional," tuturnya.

(Ant/San)-f

25 Tahun Reformasi

Reformasi 1998 dimaksudkan sebagai momentum fundamental untuk demokratisasi, pemberantasan korupsi dan penguatan masyarakat sipil. Namun amanat nilai-nilai Reformasi itu belum mewujudkan secara ideal.

Dalam berdemokrasi misalnya, The Economist Intelligence Unit (EIU) mencatat Indonesia menduduki peringkat ke-64 dunia dalam Indeks Demokrasi dengan skor 6.3. Skor tersebut menurun dari yang sebelumnya 6.48. Ini merupakan angka terendah yang dicapai Indonesia dalam kurun 14 tahun terakhir. Indonesia pun dikategorikan sebagai negara dengan edemokrasi cacat.

Soal indeks korupsi, kita bisa membaca laporan terbaru Transparency International (TI). Disebutkan, indeks persepsi korupsi Indonesia (IPK) tercatat sebesar 34 poin dari skala 0-100 pada 2022. Angka ini menurun 4 poin dari tahun sebelumnya. Penurunan IPK ini turut menjatuhkan urutan IPK Indonesia secara global. Tercatat, IPK Indonesia pada 2022 menempati peringkat ke-110. Pada tahun sebelumnya, IPK Indonesia berada di peringkat ke-96 secara global. Menurunnya IPK Indonesia mengindikasikan persepsi publik terhadap korupsi di jabatan publik dan politis di tanah air memburuk sepanjang tahun lalu.

Demokrasi dan pemberantasan korupsi merupakan dua amanat penting Reformasi 1998. Tuntutan ideal atas pelaksanaan demokrasi antara lain terjaminnya kebebasan pers, kebebasan berekspresi/berpendapat, kebebasan berkumpul

dan berserikat. Semuanya menuju pada penguatan masyarakat sipil. Sedangkan soal pemberantasan korupsi, tuntutannya adalah terbebasnya Indonesia dari praktik KKN (kolusi, korupsi dan nepotisme).

Sayangnya, dua amanat fundamental Reformasi itu belum terwujud optimal. Dalam konteks demokrasi masih banyak terjadi kekerasan negara atas masyarakat sipil berupa pembungkaman kebebasan terhadap kelompok-kelompok kritis. Tak jarang berujung kriminalisasi. Selain itu, negara juga belum berperan secara maksimal dalam mengatasi konflik-konflik sosial di masyarakat. Misalnya represi kelompok mayoritas atas minoritas berbasis SARA.

Dalam konteks korupsi, uang rakyat tetap saja jadi objek jorjoran para penyelenggara negara yang bermental korup. Mereka bekerja sama dengan kroni-kroninya, yakni pengusaha hitam dan kalangan hukum hitam. Misalnya di dalam mengakali anggaran proyek pemerintah. Ini tentu saja sangat merugikan hak-hak warga negara dalam hal pelayanan (pendidikan, kesehatan, penghasilan, lapangan pekerjaan, sandang, pangan dan lainnya). Keprihatinan atas merajalelanya korupsi pun semakin meningkat seiring dengan pelbagai upaya pelemahan lembaga penegak hukum, terutama KPK. KPK pun tidak segalak pada masa-masa awal ia berkiprah.

Di luar soal korupsi dan demokrasi, ada persoalan yang masih menganga, yakni kebudayaan. Kebudayaan cenderung ku-

rang mendapat prioritas. Kebudayaan tidak hanya bermakna seni, melainkan semesta nilai fundamental dan hasil-hasil budaya baik secara tangible maupun intangible. Kebudayaan yang berbasis pada logika, etika, estetika, inovasi kreatif, saintika (ilmu/pengetahuan) dan teknologi sejatinya bisa dijadikan modal untuk membangun bangsa dan negara melalui berbagai wahana. Tujuannya, pertama untuk melahirkan manusia berkarakter kuat, kreatif/inovatif, produktif, mandiri dan memiliki martabat.

Kedua, dalam konteks penyelenggaraan negara/pemerintahan, nilai-nilai kebudayaan jadi acuan. Fokus pembangunan tak hanya fisik (infrastruktur), tapi juga pemberdayaan kreatif dan produktif SDM. Misalnya lewat peningkatan kemampuan intelektual, teknis dan manajerial bagi publik. Juga, membuka ruang-ruang ekonomi kreatif yang memungkinkan publik bisa menjadi produsen kebudayaan, bukan lagi pasien atau konsumen budaya. Ketiga, menciptakan sistem yang berpihak pada budaya bangsa. Ini bisa dilakukan melalui regulasi dan politik anggaran.

Semangat Reformasi harus dikembalikan pada tujuan fundamentalnya. Yakni penguatan masyarakat sipil baik secara ideologis, konstitusional, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Selama ini yang menguat justru kelompok elite politik dan ekonomi yang kurang peduli pada terciptanya kesejahteraan publik.

(Penulis adalah praktisi budaya dan esais)-d

TERBITKAN ATURAN OPTIMALISASI ETLE
Polri Tak Akan Lakukan Razia

JAKARTA (KR) - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terbitkan aturan baru terkait optimalisasi penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan Electronic Traffic Low Enforcement (ETLE) dan larangan melaksanakan penindakan secara stasioner atau razia. Aturan tersebut tertuang dalam Surat Telegram bernomor: ST/1044/V/HUK.6.2/2023 tertanggal 16 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Firman Shantiyabudi ditujukan kepada para jajaran polisi lalu lintas (Polantas).

"Para Dirlantas untuk memerintahkan jajaran agar tidak melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas secara stasioner atau razia," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho di Jakarta, Jumat (19/5).

Jenderal bintang dua itu menjelaskan aturan tersebut memerintahkan Polantas untuk mengoptimalkan penindakan pelanggaran lalu lintas secara humanis dengan pemanfaatan ETLE di wilayah masing-masing. Dalam aturan tersebut juga disampaikan larangan untuk melaksanakan penindakan pelanggaran lalu lintas secara stasioner atau razia.

Kemudian, jajaran Dirlantas juga diminta me-

ingkatkan sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait untuk pengadaan sistem perangkat ETLE di wilayah masing-masing. "Aturan tersebut juga menjelaskan bentuk pelanggaran yang belum tercakup dalam sistem penindakan ETLE dan pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas dengan fatalitas tinggi, seperti berkendara di bawah umur, berboncengan lebih dari dua orang, dan menggunakan ponsel saat berkendara," jelas Sandi.

Selanjutnya, menerobos lampu merah (traffic light), tidak menggunakan helm, melawan arus, melebihi batas kecepatan, berkendara di bawah pengaruh alkohol, kelengkapan kendaraan tidak sesuai standar dan menggunakan pelat nomor palsu, serta kendaraan overload dan over dimensi, dilakukan penindakan oleh tim khusus yang sudah memiliki surat perintah dan bersertifikat petugas penindakan pelanggaran lalu lintas.

"Aturan ini dikeluarkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang optimal dan meminimalisasi pelanggaran yang dilakukan anggota saat di lapangan," bebernya.

(Ant/Has)-d

Gadis AB Diduga Tewas Akibat Miras

SEMARANG (KR) - Seorang gadis berinisial AB (16), diduga anak Penjabat (Pj) Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo yang belajar di Semarang meninggal dunia tidak wajar. Aparat Polrestaes Semarang sejak, Kamis (18/5) hingga berita ini diturunkan, Jumat (19/5) masih terus mengusut kasus itu.

"Saat ini kematian AB tengah diselidiki, sedang dilakukan autopsi, korban masih berumur 16 tahun, masih pelajar," ungkap Kasat Reskrim Polrestaes Semarang AKBP Donny di Polrestaes, kemarin.

Ia tidak tersedia memberikan keterangan secara rinci terkait status orangtua korban. Pihaknya, sejauh ini belum mengetahui

penyebab tewasnya korban. Namun, di TKP ditemukan beberapa botol minuman beralkohol atau minuman keras (miras). "Pemeriksaan di TKP ditemukan botol miras Amer Kawa-Kawa," jelasnya.

Sebelum AB dinyatakan tewas sempat dilarikan ke RSUP dr Kariadi dan korban sebelum menghembuskan napasnya yang terakhir sempat mengalami kejang.

Kasat Reskrim menyatakan, dalam upaya mengungkap penyebab kematian AB, polisi sudah memeriksa 3 orang saksi. Di antara saksi itu yang mengantarkan korban ke rumah sakit. Dalam pemeriksaan secara medis terhadap mayat korban di rumah sakit juga melibatkan labfor Polri.

(Cry)-d

Kejati Sambungan hal 1

memberantas mafia tanah, khususnya TKD. Mengingat penyimpangan ini sangat merugikan keuangan negara. "Dengan penggunaan TKD yang tidak berizin, tentu sangat merugikan negara. Apalagi pemanfaatan itu juga merugikan masyarakat. Jadi sangat serius menangani kasus mafia tanah ini. Dalam penegakan ini, kami tidak pandang bulu," tegasnya.

Menurut Anshar, pemberantasan mafia tanah ini bertujuan mengembalikan tanah kas desa ke Sultan. Sedangkan mengenai bangunan yang ada di tanah kas desa, itu merupakan kewenangan dari Gubernur DIY. "Yang jelas tujuan kami itu hanya mengembalikan tanah kas desa ke Sultan. Setelah itu menjadi kewenangan Sultan, baik akan dikembalikan seperti semula maupun lainnya," ucap mantan Kajari Boyolali ini.

Sebagaimana diketahui, penyidik Kejati DIY telah menetapkan dua tersangka kasus mafia tanah kas desa Caturtunggal yakni Direktur PT Deztama Putri Sentosa, RS (33) dan Lurah Caturtunggal AS. Keduanya sudah mendekam di Rutan Kelas II A Yogyakarta. Akibat perbuatan para tersangka, negara dirugikan sekitar Rp 2.952.002.940.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X mendukung upaya penegakan hukum oleh aparat berwenang terhadap oknum yang terbukti menyalahgunakan Tanah Kas Desa (TKD) di Kalurahan Caturtunggal, Depok, Sleman. Jika seseorang terbukti terlibat dalam penyelewengan atau penyalahgunaan TKD, maka

yang bersangkutan harus siap menghadapi konsekuensi hukum. Termasuk kasus yang terjadi terhadap Lurah Caturtunggal, Sultan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.

"Siapa pun yang melakukan, pokoknya yang melibatkan diri diproses (hukum), gitu saja," tandas Sultan HB X di Kepatihan, Yogyakarta, Jumat (19/5).

Sultan mengatakan, pengungkapan kasus yang baru saja dilakukan Kejati DIY bisa menjadi pengingat bagi lurah-lurah lainnya agar tidak menyalahgunakan TKD di wilayahnya. Karena jika lurah terbukti bersalah akan ditindak sesuai ketertuan.

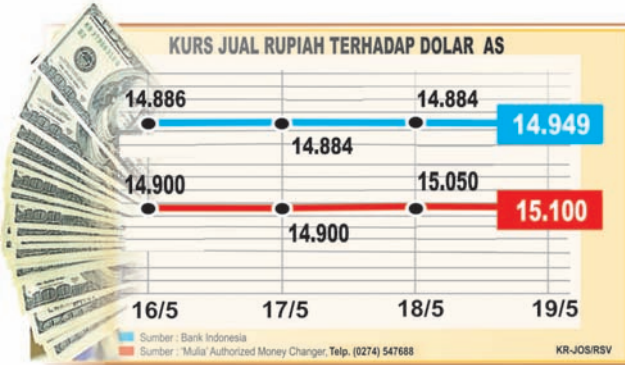
"Kalau memang menyalahgunakan (harus diproses). Tapi kalau lurah tidak menyalahgunakan ya tidak apa-apa. Tapi

yang terbukti menyalahgunakan ya ditunggu aja (konsekuensi hukumnya)," ungkap Sultan.

Ditanya nasib TKD yang diselewengkan, Sultan mengaku masih menunggu keputusan pengadilan. Termasuk keputusan apakah rumah hunian di sana bakal dirobohkan atau bagaimana. "Ya saya belum tahu nanti saja, tunggu keputusan pengadilan," ujar Sultan.

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Disptaru) DIY Krido Suprayitno menyatakan, saat ini Pemda DIY melakukan percepatan revisi Pergub Nomor 34 Tahun 2017 tentang TKD. Hal ini menyusul semakin banyaknya kasus mafia tanah yang terungkap di DIY. Bahkan pihaknya menargetkan revisi Pergub bisa diselesaikan tahun 2023 ini.

(Sni/Ria)-f



Prakiraan Cuaca Sabtu, 20 Mei 2023					
Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu C
Bantul					23-31
Sleman					23-30
Wates					23-31
Wonosari					23-30
Yogyakarta					23-31
Cerah Berawan Udara Kabur Hujan Lokal Hujan Petir					Kelembaban
					65-95
					65-95
					65-95
					65-95
					65-95

Grafis : Arlio

Childfree vs Childless: Serupa Tapi Tak Sama



Stara Asrita
Prodi Ilmu Komunikasi
Universitas Amikom Yogyakarta

BEBERAPA waktu yang lalu ramai perbincangan tentang argumen seorang influencer yang menyatakan bahwa memilih tidak memiliki anak

(childfree) bisa membuat seseorang awet muda. Menurutny memiliki anak dapat meningkatkan tingkat stress hingga depresi khususnya bagi orangtua. Akibatnya banyak warganet yang ramai mengkommentari sosial media tentang pernyataan influencer tersebut. Banyak yang setuju namun tidak sedikit yang menolak pandangan itu.

Childfree merupakan kondisi dimana seseorang atau pasangan memilih untuk tidak memiliki keturunan. Keputusan tersebut dilakukan secara sadar dan

bukan karena kondisi lain. Childfree bersifat personal karena setiap individu memiliki pemikiran masing-masing setelah menikah. Biasanya pasangan atau seseorang yang memilih childfree sudah mempertimbangkan berbagai macam akibat yang akan ditimbulkan seperti sanksi sosial.

Berbeda dengan childfree yang diputuskan secara sengaja dan penuh pertimbangan, ada istilah lain yaitu childless. Childless adalah mereka yang tidak dapat memiliki keturunan karena faktor tertentu, misalnya secara fisik atau biologis. Seseorang atau pasangan

yang childless tidak punya pilihan lain karena kondisi. Mereka sebenarnya ingin memiliki keturunan namun tidak bisa mewujudkannya.

Dalam laman alodokter.com banyak yang sudah berusaha untuk mendapatkan anak namun masih belum berhasil karena tingkat stres tinggi, gaya hidup yang tidak sehat seperti merokok, minum alkohol, kelebihan berat badan, usia yang terlalu matang hingga gangguan kesehatan seperti kelainan rahim pada perempuan, kemandulan dan lain-lain. Dalam hal ini, seseorang ingin memiliki anak namun dipengaruhi oleh kondisi

yang tidak dapat sepenuhnya dapat dikontrol.

Sebelum menikah, seseorang perlu membicarakan masalah anak. Apakah mereka mampu memiliki anak namun memilih untuk mempunyainya atau secara medis memang sudah diagnosis tidak akan mempunyai keturunan. Tidak mampu punya anak dan tidak ingin punya anak adalah hal yang berbeda sehingga harus ditekankan lagi bagi pasangan yang akan membangun rumah tangga. Dikarenakan hal tersebut masih menjadi salah satu faktor yang

menyebabkan perceraian.

Di Indonesia sendiri sebagai negara berkembang masih terasa awam ketika seseorang atau pasangan memilih untuk tidak memiliki anak. Pasalnya kebanyakan masyarakat Indonesia sangat peduli terhadap kehidupan orang lain. Secara sosial, mereka yang memilih berbeda dengan masyarakat kebanyakan akan mendapatkan komentar negatif hingga penghakiman yang berujung pada ketidaknyaman.

Apabila tidak ingin punya anak sebaiknya dibicarakan dengan



Creative Economy Park

pasangan secara baik. Selain itu perlu membicarakannya mengkomunikasikan dengan kedua keluarga agar mendapat dukungan khususnya secara moral. Apapun alasan untuk childfree atau childless adalah keputusan yang paling baik bagi seseorang dan pasangannya. Kita sebagai orang awam sebaiknya tidak mencampuri atau bahkan sampai melakukan kekerasan verbal hanya karena mereka berbeda dengan masyarakat kebanyakan. ***